

**ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011-2018**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Anandhia Xaviera Smarayosi

Nomor Mahasiswa : 16313170

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011-2018**

**SKRIPSI**

Disusun dan diujikan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ilmu Ekonomi  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nama : Anandhia Xaviera Smarayosi  
NIM : 16313170  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
YOGYAKARTA  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang telah bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Penulis,



Anandhia Xaviera Smarayosi

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2011-2018**

Nama : Anandhia Xaviera Smarayosi

NIM : 16313170

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs. M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2018**

Disusun Oleh : **ANANDHIA XAVIERA SMARAYOSI**

Nomor Mahasiswa : **16313170**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 16 Maret 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Feriyanto Prof. Dr. Drs.,M.Si.



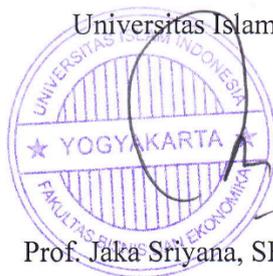
.....



.....

Penguji : Andhika Ridha Ayu Perdana, SE., M.Sc.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamin...*

*Dengan segenap kerendahan hati,*

*terselesaikannya penelitian skripsi ini*

*penulis persembahkan kepada*

*Bapak dan Ibu Tersayang, Adik-adikku yang ku sayangi,*

*keluarga besar yang dengan tulus selalu mendukung,*

*teman-teman yang selalu memotivasi,*

*serta kepada almamater penulis, Universitas Islam Indonesia*



## HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat Ku) kepadamu” –QS. Ibrahim 14:7

*“It always seems impossible until it’s done”* –Nelson Mandela

*“If I cannot do great things, I can do small things in a great way.”* –Dr. Martin

Lurther King, Jr.

*“Enthusiasm moves the world”* –Arthur J. Balfour

*“First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare.”* –Walt Disney

*“Things do not happen. Things are made to happen.”* –John F. Kennedy

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb,*

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2018**”.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, baik kemampuan, wawasan dan pengalaman yang dimiliki. Selama proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan serta kemudahan selama menulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua, Bapak Puguh Yogo Saptono dan Ibu Lusi Widyanti, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan, serta kedua adik, Oca dan Oi, yang selalu mendengarkan keluh kesah sang kakak selama merantau, terlebih dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs. M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah membimbing saya dan memberikan arahan dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.

5. Tante Fitri, Om Wiwid, Asyifa, Uti, Kakung dan Om Rolly serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan wejangan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.
6. Mas Raja, yang selalu menemani, menyemangati dan mau membantu ketika direpotkan oleh penulis.
7. *Bebski* sejak SMP, Tri, Lidia dan Agoy, yang selalu mendukung dan memberikan *positive vibes* walaupun dari pulau dan negara yang berbeda.
8. Sahabat SMA, Rizqia, Dhecan, Erni, Rani, Bano, Moja, Titin, dan Yunita, sukses untuk kita semua!
9. Sahabat seperantauan dari awal perkuliahan, Vina, Ami, Mieftah, dan Iqbal. Terimakasih kalian sudah mau jadi sahabatku selama merantau, *hug!*
10. Sahabat setanah Lampung, Madya, yang selalu mendengar keluh kesah penulis untuk menjalani kehidupan ini. Semangat egrang!
11. Teman seperbimbingan, Vina, Salma, Rara, Ichsan dan Talcha yang saling membantu, menyemangati dan berjuang bersama. Akhirnya *guys..*
12. Keluarga Pengabdian Masyarakat Aceh 2019 atau KKN angkatan 59 unit 311-312, Nanda, Winda, Neiza, Mieftah, Suci, Erlin, Wafie, Amirul, Candra, Afif, Rahmat, Sandy, dan Adli yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Keluarga makrab Forsigeniko, khususnya Keluarga Cendana / SC Forsigeniko 2018, Adi, Mieftah, Bintang, Fadhil, Yazid, Dodo, Rara, dan Salma. Terimakasih sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama!
14. Teman seperjuangan Ilmu Ekonomi 2016, senang kenal kalian semua.

15. Instansi terkait seperti BPS Provinsi Lampung dan Disnakertrans Provinsi Lampung yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu 'alaikum wr wb.*



Yogyakarta, Februari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN SKIRPSI.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAKSI.....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Teori Tenaga Kerja.....	19
2.2.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja.....	19
2.2.1.2 Permasalahan Dalam Pasar Tenaga Kerja.....	23
2.2.1.3 Teori Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja.....	24
2.2.2 Pengertian Upah Minimum.....	28
2.2.3 Pengertian PDRB.....	30

2.2.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan .....	30
2.2.4 Pengertian Belanja Daerah .....	31
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	35
2.3.1 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	35
2.3.2 Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	37
2.3.3 Hubungan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	38
2.4 Kerangka Pemikiran .....	38
2.5 Hipotesis Penelitian .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian.....	41
3.2.1 Variabel Dependen .....	41
3.2.2 Variabel Independen.....	41
3.3 Metode Analisis Penelitian.....	42
3.3.1 Uji <i>Mackinnon, White and Davidson</i> (MWD).....	42
3.3.2 Regresi Data Panel.....	44
3.3.2.1 <i>Common Effect Model</i> .....	45
3.3.2.2 <i>Fixed Effect Model</i> .....	46
3.3.2.3 <i>Random Effect Model</i> .....	48
3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	50
3.3.3.1 Uji <i>Chow</i> .....	50
3.3.3.2 Uji <i>LM</i> .....	52
3.3.3.3 Uji <i>Hausman</i> .....	53
3.3.4 Uji Hipotesis .....	55
3.3.4.1 Uji <i>t</i> .....	55
3.3.4.2 Uji <i>F</i> .....	56
3.3.4.3 Koefisien Determinasi ( <i>R-Squared</i> ).....	57

<b>BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	59
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan .....	61
4.2.1 Pemilihan Model Regresi .....	61
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel .....	63
4.2.2.1 <i>Common Effect Model</i> .....	63
4.2.2.2 <i>Fixed Effect Model</i> .....	64
4.2.2.3 <i>Random Effect Model</i> .....	65
4.2.3 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	66
4.2.3.1 Uji <i>Chow</i> .....	66
4.2.3.2 Uji <i>Hausman</i> .....	67
4.2.4 Uji Hipotesis .....	68
4.2.4.1 Uji <i>t</i> .....	68
4.2.4.2 Uji <i>F</i> .....	70
4.2.4.3 Koefisien Determinasi ( <i>R-Squared</i> ) .....	71
4.2.5 Interpretasi Hasil .....	72
4.2.6 Analisis Ekonomi .....	73
4.2.6.1 Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung.....	73
4.2.6.2 Analisis Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung .....	74
4.2.6.3 Analisis Pengaruh Variabel Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung.....	76
4.2.7 Analisis <i>Intercept</i> Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	79
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Implikasi .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>90</b>

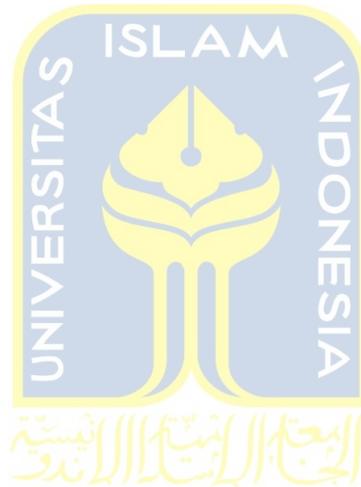


## DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Beberapa Indikator Terpilih di Sumatera, 2018 .....	2
1.2 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 .....	4
1.3 Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018.....	5
2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terkait Penyerapan Tenaga Kerja .....	15
4.1 Hasil Uji MWD Model Linier.....	61
4.2 Hasil Uji MWD Model Log-Linier .....	62
4.3 Hasil Regresi Model <i>Common Effect</i> .....	63
4.4 Hasil Regresi Model <i>Fixed Effect</i> .....	64
4.5 Hasil Regresi Model <i>Random Effect</i> .....	65
4.6 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	66
4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	67
4.8 Uji <i>t</i> .....	69
4.9 Uji <i>F</i> .....	70
4.10 Perbedaan <i>Intercept</i> Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	79

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2011-2018.....	3
2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek .....	22
2.2 Kurva Permintaan Tenaga Kerja Saat Tingkat Upah Tetap.....	23
2.3 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja.....	25
2.4 Pergeseran Kurva Permintaan dan Keseimbangan .....	26
2.5 Kurva Pengaruh Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja.....	36
2.6 Kerangka Pemikiran.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

I Data Penelitian.....	90
II Hasil Uji MWD Model Linier .....	95
III Hasil Uji MWD Log-Linier .....	96
IV Hasil Regresi Model <i>Common Effect</i> .....	97
V Hasil Regresi Model <i>Fixed Effect</i> .....	98
VI Hasil Regresi Model <i>Random Effect</i> .....	99
VII Uji Chow .....	100
VIII Uji Hausman.....	101



**ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011-2018**

**Anandhia Xaviera Smarayosi**

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

E-mail : [anandhiaxaviera@gmail.com](mailto:anandhiaxaviera@gmail.com)

**ABSTRAK**

Jumlah penduduk Provinsi Lampung yang setiap tahunnya bertambah, diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja. Bertambahnya jumlah angkatan kerja memiliki potensi pengembangan sumber daya manusia suatu daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga menjadi dasar meningkatnya penawaran tenaga kerja pada pasar. Tidak seimbang nya pasar tenaga kerja dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam ketenagakerjaan yang dapat menjadi hambatan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis determinan penyerapan tenaga kerja dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data panel pada periode tahun 2011 sampai dengan 2018 dengan regresi data panel. Ditemukan hasil bahwa upah minimum dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci : Penyerapan tenaga kerja; upah minimum kabupaten/kota; produk domestik regional bruto; dan belanja daerah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 (dua ratus) juta penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendorong pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terdapat peran penting sumber daya manusia sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Efisien dan produktifnya sumber daya manusia serta dengan jumlahnya yang besar dapat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Feriyanto, 2014). Berdasarkan pengertian peranan tersebut, jumlah penduduk yang semakin bertambah memiliki potensi pengembangan SDM suatu daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga menjadi dasar meningkatnya penawaran tenaga kerja pada pasar.

Penawaran tenaga kerja didasari dengan adanya SDM dalam usia kerja yang ingin menawarkan jumlah jam kerjanya untuk bekerja. Ketika penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan permintaannya akan menimbulkan suatu permasalahan dalam ketenagakerjaan yaitu timbulnya

pengangguran serta meingkatkan penduduk miskin yang dapat menjadi hambatan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Beberapa Indikator Terpilih di Pulau Sumatera, 2018**

<b>Provinsi</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>Tingkat Pengangguran (%)</b>	<b>Penduduk Miskin (%)</b>
Aceh	4,61	6,36	15,68
Sumatera Utara	5,18	5,56	8,94
Sumatera Barat	5,14	5,55	6,55
Riau	2,34	6,20	7,21
Jambi	4,71	3,86	7,85
Sumatera Selatan	6,04	4,23	12,82
Bengkulu	4,99	3,51	15,41
<b>Lampung</b>	<b>5,25</b>	<b>4,06</b>	<b>13,01</b>
Bangka Belitung	4,45	3,65	4,77
Kep. Riau	4,56	7,12	5,83

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Lampung 2019

Provinsi Lampung memiliki urutan tertinggi kedua dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera pada indikator tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,25% dengan tingkat pengangguran sebesar 4,06% dan tingkat penduduk miskin pada urutan tertinggi ketiga sebesar 13,01%. Melihat dari perbandingan tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat

diikuti dengan tingginya tingkat penduduk miskin atau tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Penambahan jumlah penduduk suatu daerah akan dibarengi dengan meningkatnya jumlah usia kerja di daerah tersebut. Seseorang dikatakan sudah masuk dalam kategori usia kerja ketika seseorang tersebut sudah menginjak umur lima belas tahun, batasan ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengukuran data ketenagakerjaan. Dalam kategori usia kerja tersebut terdapat pembagian penduduk dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.



Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung

**Gambar 1.1**

**Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Lampung, 2011-2018**

Berdasarkan data pada gambar 1.1 terjadi peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja di Provinsi Lampung setiap tahunnya dan terlihat perbandingan antara jumlah penduduk dan angkatan kerja yang jumlah angkatan kerjanya mencapai lima puluh persen dari jumlah penduduk Provinsi Lampung. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 7.735.914 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.696.066 jiwa hingga tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 8.370.485 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 4.232.066 jiwa.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan atau terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas. Penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung menurut seluruh sektor mulai dari pertanian, industri dan jasa dijelaskan di tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Provinsi Lampung, 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Tenaga Kerja (Jiwa)</b>
2014	3.673.158
2015	3.635.258
2016	3.931.321
2017	3.896.230
2018	4.060.377

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka, 2015-2019

Berdasarkan data BPS di atas, dapat dilihat jumlah tenaga kerja yang terserap di Provinsi Lampung tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 3.673.158 jiwa hingga tahun 2018 menjadi 4.060.377 jiwa. Naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kesempatan kerja yang ada dalam menyerap tenaga kerja.

**Tabel 1.3**

**Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Lampung, 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>UMP (rupiah)</b>	<b>PDRB (juta rupiah)</b>	<b>Belanja Daerah (rupiah)</b>
2014	1.399.037	189.797.491	19.989.209.415.680
2015	1.581.000	199.536.917	22.194.030.051.328
2016	1.763.000	209.813.980	31.542.472.081.408
2017	1.908.447,50	220.657.349	28.850.595.954.688
2018	2.074.673,27	232.214.280	31.542.471.849.209

Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung, Statistik Daerah Provinsi Lampung, Tinjauan Ekonomi Regional Provinsi Lampung dan Provinsi Lampung Dalam Angka, 2014-2019

Penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu upah, di mana upah merupakan variabel paling dominan dalam pasar tenaga kerja. Terjadinya perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi pekerja dalam mengambil keputusan untuk bekerja.

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa upah minimum provinsi (UMP) mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana pada dasarnya kenaikan UMP juga membuat perubahan pada upah minimum kabupaten/kota (UMK). Peningkatan upah ini menjadi suatu pertimbangan pada perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. Perusahaan akan mengharapkan upah minimum yang lebih rendah, hal ini dikarenakan perusahaan dalam mempertimbangkan profit atau pendapatan yang maksimum memperhatikan besarnya upah yang diberikan.

Terserapnya tenaga kerja di Provinsi Lampung juga dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto (PDRB) setiap kabupaten/kota. Pertumbuhan angka PDRB merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan mengukur total output barang dan jasa. Pengaruh PDRB terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi saat meningkatnya nilai PDRB, maka akan meningkatkan jumlah nilai tambah output di seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan jumlah output tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja (Boediono, 1999).

Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Lampung dalam tabel 1.3 memperlihatkan bahwa PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sesuai asumsinya, PDRB seharusnya mampu meningkatkan kegiatan usaha dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan produksi,

suatu usaha akan mengoptimalkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menyerap tenaga kerja yang lebih untuk meningkatkan produksinya.

Peranan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran dapat dilihat dari seberapa mampu pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Salah satu indikator yang menjadi pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan melihat belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah dalam pengalokasian yang efisien. Distribusi dana tersebut mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja. Pada tabel 1.3 memperlihatkan jumlah belanja daerah Provinsi Lampung yang cenderung meningkat, di mana pada tahun 2014 sebesar 19,9 Triliyun dan pada 2018 mencapai 31,5 Triliyun, terjadi peningkatan sekitar 57,7% dalam lima tahun terakhir. Perubahan yang cukup drastis ini seharusnya mampu mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap di Provinsi Lampung. Pergerakan ekonomi mampu didorong oleh pengeluaran pemerintah melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum/publik) yang telah dianggarkan dalam belanja pembangunan atau belanja langsung (Ziyadaturrofiqoh, 2018).

Berdasarkan latar belakang inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Adapun judul yang dipilih oleh peneliti yaitu “**Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2018**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana jenjang Strata-1 (S-1) di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan dapat memberikan wawasan tentang ketenagakerjaan serta menambah pengalaman penulis dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Provinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada sektor ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan perbandingan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat kajian pustaka dan landasan teori. Dalam kajian pustaka berisi tentang penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan. dalam landasan teori memuat pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti.

## BAB III : METODE PENELITIAN

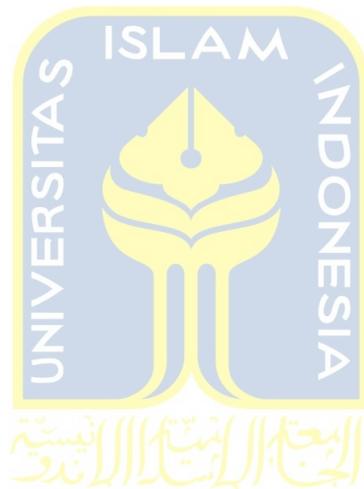
Bab ini memuat uraian bahan atau materi penelitian, menjelaskan tentang jenis dan cara pengumpulan sumber data, alat dalam menguji penelitian, definisi operasional variabel, analisis dengan menggunakan metode yang sesuai, dan uji statistik yang digunakan.

## BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan data yang digunakan, hasil penelitian dan analisis yang sesuai dengan hasil yang diperoleh dari data yang telah diolah serta pembahasannya.

## BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan dan implikasi dari simpulan dalam memecahkan masalah penelitian serta implikasi adanya kesesuaian teori yang digunakan dengan fenomena yang diteliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Penelitian yang telah dilakukan oleh Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel dengan model regresi *fixed effect*, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan secara simultan upah minimum provinsi, PDRB dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam jurnalnya (Feriyanto dan Sriyana, 2016) yang berjudul “*Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia*” menggunakan data panel 33 Provinsi untuk periode 2006 hingga 2013. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan upah minimum dan beberapa faktor ekonomi lain terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan menggunakan

regresi data panel. Berdasarkan hasil estimasi regresi terbaik dengan menggunakan model *fixed effect* menjelaskan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel investasi asing dan investasi dalam negeri berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Devi Rizky Vitalia (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang” pada rentang waktu tahun 1993-2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan hasil penelitian menemukan bahwa investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan ekspor daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang.

Adil (2017) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015” dengan menggunakan data *time series* dan analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi, upah minimum provinsi dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, secara parsial variabel investasi

memiliki hubungan yang positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah minimum provinsi memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan variabel belanja pemerintah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rudi Hartono, Arfiah Busari dan Muhammad Awaluddin (2018) mengenai “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Samarinda” dengan menggunakan analisis Cobb Douglas dan data yang digunakan adalah data sekunder dalam kurun waktu 2006-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan upah minimum kota secara simultan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda. Sedangkan secara parsial, PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda dan upah minimum kota tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.

Ariyanto (2010) telah melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan alat analisis kuantitatif dengan ECM (*Error Correction Model*) dan hasil analisis

menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah serta dalam jangka pendek terdapat pengaruh negatif pada variabel pengeluaran pemerintah dan nilai ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah sedangkan dalam jangka panjang tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian Terkait Penyerapan Tenaga Kerja**

<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode Analisis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Wasilaputri, Febryana Rizqi (2016). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014.	Variabel Dependen : - Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen : - Upah Minimum Provinsi - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku - Investasi	Analisis regresi data panel dengan model regresi <i>fixed effect</i>	Secara parsial, variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, dan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Variabel upah minimum provinsi, PDRB dan Investasi secara

			simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
Feriyanto, Nur dan Jaka Sriyana (2016). <i>Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia.</i>	Variabel Dependen : - Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen : - Upah Minimum - Investasi Dalam Negeri - Investasi Asing - Pertumbuhan Ekonomi	Analisis regresi data panel dengan model regresi <i>fixed effect</i>	Variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja antar provinsi. Variabel investasi dalam negeri dan asing berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, faktor spasial yang dicirikan dengan lokasi provinsi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Vitalia, Devi Rizky (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang.	Variabel Dependen : - Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen : - Investasi Swasta - Pengeluaran	Analisis regresi linear berganda	Variabel investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan ekspor daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang.

	Pemerintah Daerah - Ekspor Daerah		
Adil (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2015.	Variabel Dependen : - Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen : - Investasi (PMA dan PMDN) - Upah Minimum Provinsi - Belanja Pemerintah	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan, variabel investasi, upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial, Variabel investasi dan variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel belanja pemerintah secara parsial berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hartono, Rudi. Arfiah Busari, dan Muhammad	Variabel Dependen : - Penyerapan	Analisis fungsi Cobb-Douglass	Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap

<p>Awaluddin (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.</p>	<p>Tenaga Kerja Variabel Independen : - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan menurut lapangan usaha - Upah Minimum Kota</p>		<p>penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda. Variabel upah minimum kota tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.</p>
<p>Ariyanto (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007.</p>	<p>Variabel Dependen : - Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen : - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2000 - Pengeluaran Pemerintah - Ekspor</p>	<p>Analisis Kuantitatif dengan ECM (<i>Error Correction Model</i>)</p>	<p>Variabel PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Variabel pengeluaran pemerintah dan variabel ekspor terdapat pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek, namun tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dalam jangka panjang.</p>

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Tenaga Kerja**

Sumarsono (2003) menjelaskan pengertian tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Peran sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dapat berada di sektor formal ataupun informal. Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi akan dapat menyebabkan meningkat pula perkembangan sektor formal ataupun informal dalam kegiatan ekonomi yang akan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja. Kegiatan berserikat bagi pekerja yang berada dalam sektor formal dibicarakan dalam ekonomi sumber daya manusia (Feriyanto, 2014).

#### **2.2.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu kemampuan lapangan kerja dalam menyerap jumlah tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja itu. Penyerapan tenaga

kerja dapat sama atau lebih kecil dari kesempatan kerja yang tersedia. Ketika jumlah penyerapan tenaga kerja sama dengan jumlah kesempatan kerja maka tidak terjadi pengangguran. Tetapi sebaliknya, ketika penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran kerja (Feriyanto, 2014). Penyerapan tenaga kerja ini termasuk dalam fungsi permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja, dimana suatu kegiatan usaha atau perusahaan sebagai pelaku dalam pasar tenaga kerja akan menyediakan lapangan kerja kepada calon pekerja yang menawarkan jam kerjanya.

Permintaan tenaga kerja menjelaskan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yang biasanya hubungan keduanya bersifat negatif. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan terhadap barang dan jasa. Dengan ini, banyak sedikitnya permintaan tenaga kerja tergantung dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Tujuan utama dari produsen adalah untuk memaksimalkan keuntungan (Santoso, 2012).

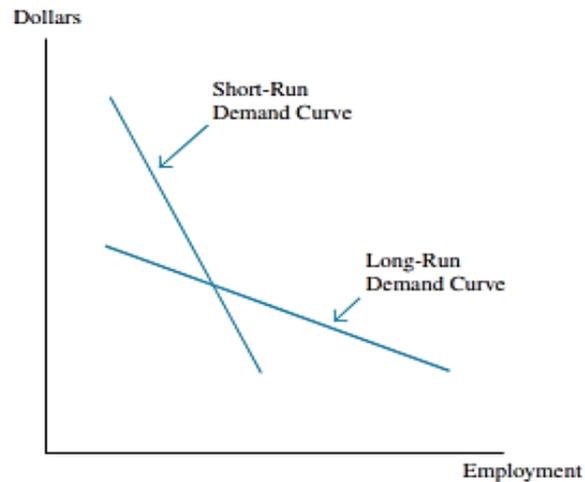
Sumarsono (2003) menjelaskan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, pemilihan atau penggunaan *input*

yang akan memberikan tambahan penerimaan yang lebih besar dari pada tambahan terhadap total biayanya akan dilakukan oleh pengusaha.

Suatu kurva permintaan terhadap pekerja menggambarkan:

1. Pada kurun waktu tertentu, jumlah pekerja maksimum yang akan dipekerjakan berada pada setiap tingkat upah tertentu.
2. Bagi majikan, terdapat sebuah tingkat upah yang maksimum untuk mempekerjakan jumlah pekerja tertentu.

Dalam analisis ini diasumsikan bahwa : (1) perusahaan menjual output ke pasar yang benar-benar kompetitif; dan (2) perusahaan membeli input di pasar yang benar-benar kompetitif (Sumarsono, 2003).

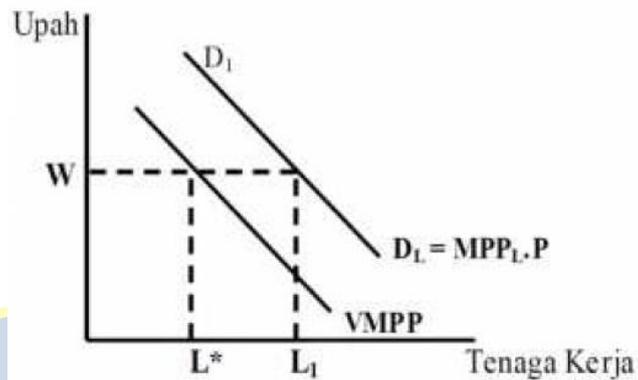


**Gambar 2.1**  
**Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek**

Sumber: (Borjas, 2013)

Permintaan tenaga kerja dibedakan menjadi permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, faktor produksi tenaga kerja jumlahnya dapat berubah yang mana dianggap variabel, sedangkan faktor produksi lainnya dianggap konstan (tetap) contohnya seperti modal. Sedangkan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang menganggap kedua faktor produksi tersebut bersifat variabel atau dapat berubah. Pada jangka pendek, perusahaan dengan keuntungan yang maksimal memiliki tingkat permintaan tenaga kerja yang terjadi pada

saat biaya marginal tenaga kerja dan nilai produktivitas tenaga kerja berada pada keseimbangan (Santoso, 2012).



**Gambar 2.2**

**Kurva Permintaan Tenaga Kerja Saat Tingkat Upah Tetap**

Sumber : (Bellante dan Jackson, 1990)

**2.2.1.2 Permasalahan Dalam Pasar Tenaga Kerja**

Dalam pasar tenaga kerja terdapat permasalahan yang muncul berkaitan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya faktor *demand* dan *supply* tenaga kerja yang tidak seimbang. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu lebih besarnya jumlah permintaan tenaga kerja di pasar dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.

Output yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kelangkaan tenaga kerja. Penyebab kurangnya penawaran tenaga kerja tersebut yaitu rumah tangga sebagai faktor penyedia tenaga kerja ataupun faktor mekanisme distribusi tenaga kerja yang terganggu. Terhambatnya penawaran tenaga kerja tersebut juga dapat disebabkan oleh informasi dan tenaga kerja yang tidak mampu melakukan akses memperoleh informasi tersebut (Feriyanto, 2014).

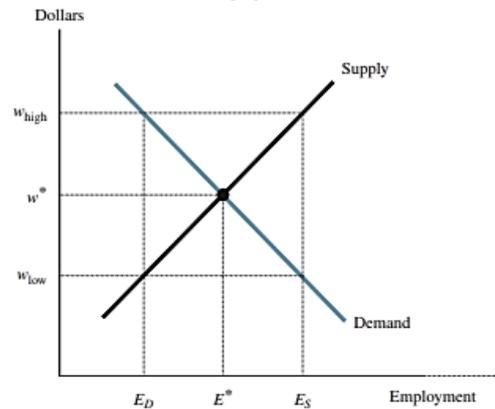
Adapun permasalahan lainnya yang sering terjadi yaitu jumlah permintaan tenaga kerja di pasar lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Sempitnya peluang kerja ini dapat memunculkan permasalahan baru yaitu meningkatnya angka pengangguran dan hal tersebut juga mampu menurunkan kesejahteraan seseorang.

### **2.2.1.3 Teori Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja**

Feriyanto (2014) menjelaskan pengertian pasar kerja adalah bertemunya penjual jasa tenaga kerja dan pembeli jasa yang kemudian melakukan transaksi untuk kebutuhan tenaga kerja (permintaan) dan persediaan tenaga kerja (penawaran).

Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja.

Produsen sebagai pihak yang melakukan permintaan tenaga kerja, akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah pasar (Santoso, 2012).

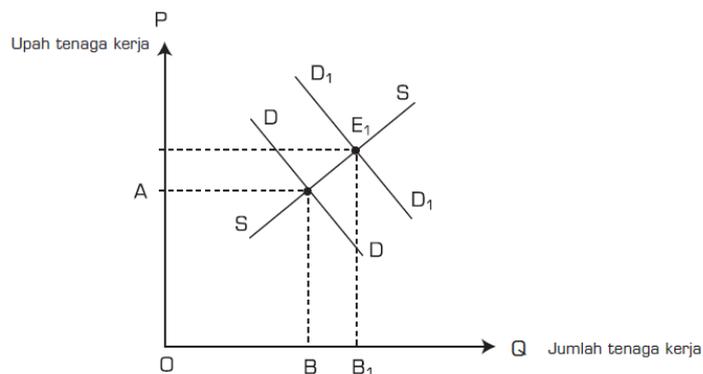


**Gambar 2.3**

### **Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja**

Sumber : (Borjas, 2013)

Permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut dengan seimbang menentukan penggunaan tenaga kerja dan tingkat upah pada saat bersamaan. Kurva permintaan ataupun kurva penawaran tenaga kerja yang bergeser akan membuat keseimbangan tersebut berubah (Feriyanto, 2014).



**Gambar 2.4**

### **Pergeseran Kurva Permintaan dan Keseimbangan**

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja sebagai berikut:

#### 1. Jumlah produsen

Produsen adalah pengguna jasa tenaga kerja. Kurva permintaan yang bergeser ke kanan terjadi ketika bertambah besarnya jumlah produsen maka total permintaan tenaga kerja juga akan semakin besar dengan asumsi jumlah penggunaan tenaga kerja tetap untuk setiap produsen.

#### 2. Jumlah permintaan *output*

Melalui perubahan harga produk ( $P$ ) dan nilai produk marginal ( $VMP_L$ ), permintaan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh permintaan *output* dari masyarakat. Naiknya permintaan *output* maka akan menaikkan harga

produk dan akhirnya mempengaruhi  $VMP_L$ . Naiknya  $VMP_L$  akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan,.

### 3. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mengharuskan produsen besar untuk menaikkan penggunaan tenaga kerja dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Bergesernya kurva permintaan ke kanan disebabkan naiknya penggunaan tenaga kerja oleh produsen.

### 4. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara mampu mendorong kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan, hal ini disebabkan peningkatan kapasitas produksi oleh produsen dengan mengadakan perluasan pabrik akan menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

### 5. Teknologi

Produsen yang menggunakan teknologi baru dapat berdampak pada peningkatan  $MP_L$ . Akibatnya  $VMP_L$  akan naik dan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan. Tetapi kurva permintaan tenaga kerja juga dapat bergeser ke kiri di mana terjadi substitusi dari penggunaan teknologi (mesin/peralatan) yang menggantikan penggunaan tenaga

kerja. Hal ini akan berdampak pada penurunan penggunaan tenaga kerja oleh produsen.

#### 6. Anggaran biaya tenaga kerja

Kurva permintaan tenaga kerja dapat bergeser ke kanan dengan bertambahnya anggaran biaya tenaga kerja pada perusahaan, hal ini diartikan naiknya kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari pasar tenaga kerja.

#### 7. Harga faktor *input* lainnya

Naiknya penggunaan tenaga kerja dengan melakukan substitusi antara pengurangan faktor *input* yang mengalami kenaikan harga (biaya) dengan menambah penggunaan tenaga kerja. Akibat naiknya penggunaan tenaga kerja akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan, begitupun sebaliknya.

### 2.2.2 Pengertian upah minimum

Upah merupakan bayaran bagi pekerja per unit waktu tertentu misalnya setiap bulan, setiap hari atau setiap jam (Santoso, 2012). Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja (Wihastuti, 2018). Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam

PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara Minimum Regional, Sektoral Regional, maupun Sub Sektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah Upah Pokok dan Tunjangan (Sumarsono, 2003).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur setiap tanggal 1 November dengan keputusan gubernur. Gubernur dapat menetapkan UMK. Upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut penetapan upah minimum yang dihitung dengan menggunakan formula perhitungan:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan :

$UM_n$  = Upah Minimum yang akan ditetapkan

$UM_t$  = Upah Minimum tahun berjalan

$Inflasi_t$  = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang sebelumnya sampai September tahun berjalan

$\Delta PDB_t$  = Pertumbuhan PDB yang dihitung dari pertumbuhan PDB (kwartal III dan IV tahun

sebelumnya) dan PDB (kwartal I dan II tahun berjalan).

Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah melindungi pekerja dari tingkat upah yang terlalu murah (Santoso, 2012).

### **2.2.3 Pengertian PDRB**

Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB, adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang (Kairupan, 2013).

#### **2.2.3.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB atas Dasar Harga Konstan**

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas dasar harga

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan (Hartono, 2018).

#### **2.2.4 Pengertian Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, penggunaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Terdapat klasifikasi belanja daerah yaitu menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja.

Berdasarkan struktur APBD pada Permendagri No. 21 Tahun 2011, berikut pengelompokan belanja daerah:

## 1. Belanja tidak langsung

Penganggaran belanja tidak langsung tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup:

### a. Belanja pegawai

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, belanja pegawai diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan, baik dalam bentuk uang maupun barang atau dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya.

### b. Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### c. Subsidi

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

d. Hibah

Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil dan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Belanja tidak terduga

Belanja ini digunakan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban suatu daerah ketika terjadi kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2. Belanja langsung

Penganggaran belanja langsung terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung mencakup:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai pada kelompok ini meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

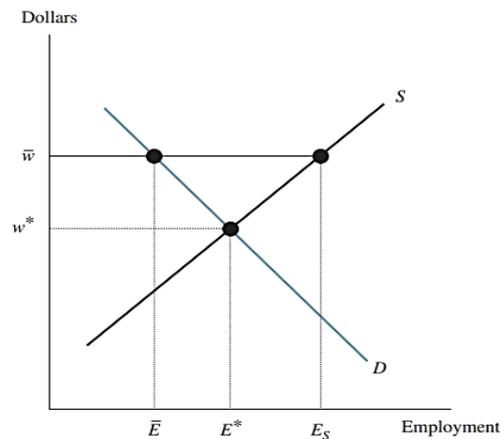
c. Belanja modal

Dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, pengeluaran belanja modal digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan Upah Mimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Perusahaan akan merasa dilema ketika upah minimum provinsi mengalami kenaikan yang tinggi, hal ini disebabkan peraturan pengupahan yang telah diatur pemerintah harus dipatuhi oleh perusahaan, sedangkan terdapat permasalahan *labor cost* yang akan dirasa menjadi berat terutama bagi industri padat karya dan industri kecil menengah (Febryana, 2016).



**Gambar 2.5**  
**Kurva Pengaruh Upah Minimum Terhadap**  
**Permintaan Tenaga Kerja**

Suatu unit usaha atau perusahaan akan selalu berusaha mencapai salah satu tujuannya yaitu mengoptimalkan keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari gambar 2.5 yang menjelaskan kurva pengaruh upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja, ketika upah naik maka permintaan tenaga kerja akan berpindah ke kiri yang menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja berkurang. Perpindahan kurva akibat perubahan upah yang meningkat didasarkan sebagaimana upah pada perusahaan dianggap sebagai biaya produksi dan dapat menghambat perusahaan dalam tujuannya untuk mengoptimalkan keuntungan, sehingga ketika upah minimum meningkat maka perusahaan akan memutuskan untuk mengurangi tenaga kerjanya.

Bagi suatu perusahaan, tingkat harga dipengaruhi oleh gaji dan upah, yang pada gilirannya berakibat pada perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah yang dibayarkan akan menghasilkan harga produk yang semakin tinggi yang mana akan memberikan pengaruh pada daya saing perusahaan di pasar, hal ini akan mempengaruhi perluasan dan pemerataan dalam kemampuan perusahaan untuk menyediakan kesempatan kerja (Hartono, 2018).

### **2.3.2 Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Sifat permintaan tenaga kerja adalah *derived demand*, yang artinya bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengusaha sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. Sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka harus dijaga bahwa permintaan masyarakat terhadap produk perusahaan harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat. Peningkatan tingkat upah dan pendapatan masyarakat mampu meningkatkan daya serap terhadap permintaan tenaga kerja, maka permintaan konsumsi masyarakat akan meningkat. Permintaan konsumsi yang berubah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat yang naik akan menyebabkan permintaan tenaga kerja naik (Sumarsono, 2003).

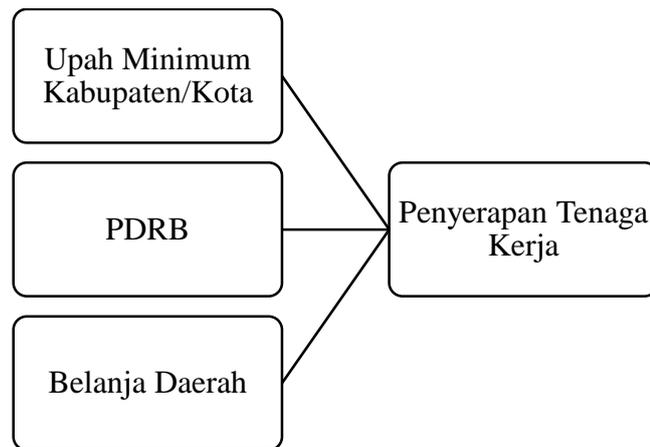
### **2.3.3 Hubungan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Belanja daerah merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), terutama dalam kegiatan pembangunan, dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan atau belanja langsung (Ziyadaturrofiqoh, 2018).

Siestri (2013) menjelaskan bahwa salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah yaitu belanja daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Belanja daerah yang semakin besar diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Rangkuman dari seluruh dasar-dasar teori yang dijelaskan dalam penelitian ini disebut dengan kerangka pemikiran, di mana proses penelitian yang dilakukan digambarkan melalui skema singkat berikut:



**Gambar 2.6**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dan kemudian data tersebut diolah menggunakan salah satu *software* olah data. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Perolehan data-data tersebut bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. Sumber pendukung lainnya.

Data-data tersebut meliputi data jumlah tenaga kerja, upah minimum kabupaten/kota, produk domestik regional bruto (PDRB) dan belanja daerah pada 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yaitu di empat belas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang,

Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu 2011-2018.

Terdapat satu kabupaten yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, hal ini dikarenakan kabupaten tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat dan baru diresmikan menjadi sebuah kabupaten baru pada tahun 2013 sehingga terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini.

### **3.2 Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian**

#### **3.2.1 Variabel Dependen**

Sriyana (2014) menjelaskan bahwa variabel dependen atau variabel terikat merupakan sebuah variabel yang dipengaruhi oleh satu atau lebih (beberapa) variabel bebas.

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk yang bekerja di empat belas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

#### **3.2.2 Variabel Independen**

Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Penetapan jumlah variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Sriyana, 2014).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah data jumlah upah minimum di setiap kabupaten/kota Provinsi Lampung pada periode 2011-2018 dengan menggunakan satuan rupiah.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah data jumlah PDRB atas dasar harga konstan 2010 di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Lampung pada periode 2011-2018 dengan menggunakan satuan juta rupiah.
3. Belanja daerah (BD) adalah data jumlah belanja pemerintah daerah atau pengeluaran pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Lampung pada periode 2011-2018 dengan menggunakan satuan rupiah.

### 3.3 Metode Analisis Penelitian

#### 3.3.1 Uji Mackinnon, White and Davidson (MWD)

Sebelum melakukan regresi, pertama-tama dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) untuk menentukan model manakah yang akan digunakan, linier atau log-linier.

Berikut perbedaan persamaan regresi antara model linier dan log-linier:

$$\text{Linier} \quad \rightarrow Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

$$\text{Log-Linier} \quad \rightarrow \log Y_i = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + e_i$$

Keterangan :

$Y$	= Penyerapan Tenaga Kerja
$X_1$	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
$X_2$	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
$X_3$	= Belanja Daerah
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien Regresi
$e$	= <i>Error Term</i>
$i$	= Periode Waktu

Untuk melakukan uji MWD tersebut, diasumsikan bahwa:

$H_0$  : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

$H_a$  : Y adalah fungsi log-linier dari variabel independen X (model log-linier)

Dalam melakukan uji MWD, dilakukan beberapa prosedur metode MWD sebagai berikut:

1. Estimasi model linier dan didapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dinamai  $F_1$ .

2. Estimasi model log-linier dan didapatkan nilai prediksinya dinamai  $F_2$ .
3. Dapatkan nilai  $Z_1 = \log(F_1) - F_2$  dan  $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Lakukan regresi dengan memasukkan variabel  $Z_1$  pada regresi persamaan linier, seperti berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_1 + e_i$$

Jika  $Z_1$  signifikan secara statistik melalui uji t maka menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log-linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka gagal menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah linier.

5. Lakukan regresi dengan memasukkan variabel  $Z_2$  pada regresi persamaan log-linier, seperti berikut:

$$\log Y_i = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 Z_2 + e_i$$

jika  $Z_2$  signifikan secara statistik melalui uji t maka ditolak hipotesis alternatif sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif sehingga model yang benar adalah log-linier.

### 3.3.2 Regresi Data Panel

Model regresi data panel merupakan model yang digunakan dalam metode analisis penelitian. Dalam data panel terdapat keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh. Pertama, banyaknya data yang digabungkan dari data *time series* dan *cross section* akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, informasi dari data *time series* dan *cross section* yang digabungkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (Widarjono, 2018).

Pada model regresi data panel, terdapat 3 (tiga) estimasi model dengan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan hasil regresi yang terbaik dalam penelitian, yaitu:

### 3.3.2.1 Common Effect Model (CEM)

Model ini merupakan regresi yang bersifat generalisasi data dan paling sederhana serta paling mudah untuk dilakukan. Asumsi dalam regresi data panel dengan metode *common effects* adalah asumsi yang menganggap bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Sistematika model *common effect* adalah menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section* ke dalam data panel (*pool data*). Dari data tersebut kemudian di regresi dengan metode OLS (Sriyana, 2014).

Berikut persamaan matematis model *common effects* :

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$i$  = jumlah observasi

$t$  = banyaknya waktu

$n \times t$  = jumlah data panel

$\varepsilon$  = residual

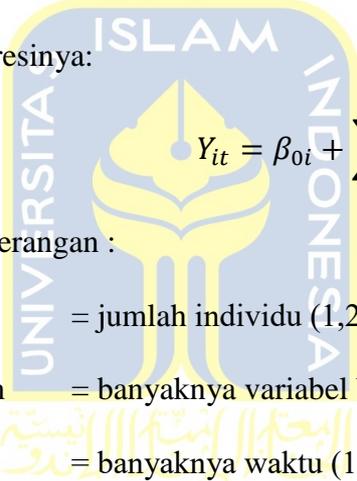
### 3.3.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Hasil suatu regresi diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Model ini dikenal dengan model regresi efek tetap (*fixed effect*), maksudnya adalah bahwa satu obyek observasi memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya akan tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Pada pendekatan *fixed effects*, metode estimasi dapat dilakukan dengan memasukkan variabel semu (*dummy*) untuk menjelaskan adanya perbedaan antar intersep. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya digunakan variabel (*dummy*). Model ini dapat diregresi dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* atau LSDV (Sriyana, 2014).

Terdapat dua asumsi dalam model regresi *fixed effect* yaitu:

- a. Asumsi slope regresi konstan tetapi intersep bervariasi antar unit

Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan, tetapi intersep berbeda sebagai akibat adanya perbedaan antar individu/obyek. Berikut persamaan regresinya:



$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

Keterangan :

$i$  = jumlah individu (1,2,...,n)

$n$  = banyaknya variabel bebas

$t$  = banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$  = jumlah data panel

$e$  = residual

- b. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi berdasar antar unit dan periode waktu

Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan, tetapi intersep berbeda sebagai akibat adanya

perbedaan antar individu/obyek maupun perbedaan periode waktu data yang dianalisis. Persamaan regresi sesuai asumsi yang digunakan, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

Keterangan :

$i$  = jumlah individu (1,2,...,n)

$n$  = banyaknya variabel bebas

$t$  = banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$  = jumlah data panel

$e$  = residual

### 3.3.2.3 Random Effect Model (REM)

*Random effect model* merupakan alternatif solusi jika *fixed effect* tidak tepat. Pada model ini, diasumsikan bahwa intersep dan konstanta yang berbeda disebabkan oleh residual/*error* sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara *random*. Atas dasar tersebut, model *random effect* disebut juga dengan *error component model* (ECM).

Terdapat dua asumsi yang berbeda yang digunakan dalam regresi dengan model *random effect*, kedua asumsi tersebut sebagai berikut:

a. Intersep dan slope berbeda antar individu

Pada asumsi ini analisis intersep dan slope yang berbeda hanya dilihat dari analisis perbedaan antar obyek individu. Adanya perbedaan intersep dan koefisien regresi berdasarkan perubahan waktu masih dikesampingkan. Berikut persamaan regresinya:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_{ki} X_{kit} + e_{it}$$

Keterangan :

$m$  = jumlah observasi (1,2,...,m)

$n$  = banyaknya variabel bebas

$t$  = banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$  = jumlah data panel

$e$  = residual

b. Intersep dan slope berbeda antar individu/unit dan periode waktu

Asumsi ini adalah perbedaan antar obyek individu analisis menyebabkan adanya perbedaan hasil estimasi intersep dan slope yang dianalisis dan sekaligus karena adanya perubahan antar periode waktu. Perbedaan intersep dan slope yang

terjadi pada asumsi ini dikarenakan pengaruh residual.

Penyusunan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_{kit} X_{kit} + e_{it}$$

Keterangan :

$m$  = jumlah observasi (1,2,...,m)

$n$  = banyaknya variabel bebas

$t$  = banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$  = jumlah data panel

$e$  = residual

### 3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan analisis regresi data panel, diperlukan menentukan model terbaik dalam olah data yang dilakukan. Dalam memilih model yang terbaik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu uji *chow* atau uji F, uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan Uji *Hausman*. Berikut tahapan dalam memilih model terbaik pada regresi data panel:

#### 3.3.3.1 Uji *Chow* atau Uji F (*common effect model* atau *fixed effect model*)

Uji *chow* atau uji F digunakan untuk mencari tahu teknik regresi data panel yang lebih baik menggunakan *common effect*

*model* atau *fixed effect model*. Perhitungan nilai *F-test* dengan rumus berikut:

$$F_{hitung} = \frac{SSRr - SSRu/q}{SSRu/(n - k)}$$

Keterangan :

SSRr = *Sum of Squared residuals metode common effect*

SSRu = *Sum of Squared residuals metode fixed effect*

$q$  = jumlah restriksi metode *common effect*

$n$  = jumlah observasi

$k$  = jumlah parameter estimasi metode *fixed effect*

Berikut *F-test* dengan hipotesis yang dibandingkan:

$H_0$  : Memilih model *common effect*

$H_a$  : Memilih model *fixed effect*

Hipotesis nol yang digunakan adalah bahwa intersep memiliki nilai sama. Nilai *F* hitung. Nilai *F* hitung yang diperoleh selanjutnya diuji berdasarkan nilai *F* tabel dengan *df* sebesar  $m$  untuk numerator dan  $n-k$  untuk denominator. Nilai statistik *F* akan mengikuti distribusi statistik *F* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar/sebanyak  $n-1$  untuk numerator dan sebesar (i.t)- $k$  untuk denominator. Kesimpulannya adalah apabila dihasilkan nilai statistik *F* lebih besar dibandingkan nilai *F*-tabel pada tingkat

signifikansi yang digunakan, maka akan menolak hipotesis nol, ini berarti asumsi koefisien intersep dan *slope* adalah tetap tidak benar, sehingga model *fixed effect* lebih baik digunakan untuk teknik regresi data panel jika dibandingkan dengan model regresi data panel *common effects* (Sriyana, 2014).

### 3.3.3.2 Uji LM (*common effect model* atau *random effect model*)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) oleh Breusch-Pagan digunakan untuk mencari tahu teknik regresi data panel yang lebih baik menggunakan *common effect* metode OLS atau *random effect model*. Perhitungan nilai *LM-statistic* dengan rumus sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left( \frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left( \frac{\sum_{i=1}^n (T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Keterangan :

$T$  = jumlah periode waktu

$n$  = jumlah individu

$\hat{e}$  = residual metode OLS

Berikut *LM-test* dengan hipotesis yang dibandingkan:

$H_0$  : Memilih model *common effect*

$H_a$  : Memilih model *random effect*

Greene (dalam Sriyana, 2014:184) menjelaskan bahwa nilai hipotesis nol yang digunakan adalah varian data *cross section* bernilai nol. Nilai LM hitung tersebut selanjutnya diuji berdasarkan nilai  $X^2$  tabel dengan *df* sebesar jumlah variabel independen. Jika uji LM signifikan, dalam arti nilai LM hitung lebih besar dari  $X^2$  tabel, maka hipotesis nol ditolak sebagai model dengan pendekatan *random effects* lebih tepat untuk digunakan.

Nilai LM dapat dilihat dari hasil regresi Breusch-Pagan, jika nilai *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  maka menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat adalah model *random effect*, namun jika nilai *p-value* lebih besar dari  $\alpha$  maka gagal menolak  $H_0$  sehingga model yang dipilih adalah model *common effect*.

### 3.3.3.3 Uji Hausman (*fixed effect model* atau *random effect model*)

Uji pemilihan model antara *fixed effects* dan *random effects* dilakukan dengan asumsi bahwa kedua model pendekatan tersebut adalah lebih baik dibandingkan dengan model OLS. Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pilihan model

yang lebih baik di antara model LSDV pada pendekatan *fixed effects* dan GLS pada pendekatan *random effects* (Sriyana, 2014). Uji Hausman berdasarkan kriteria oleh Wald akan mengikuti distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$  dengan mengestimasi nilai  $m$  dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$m = \hat{q} \text{var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

di mana  $\hat{q} = [\hat{\beta}_{OLS} - \hat{\beta}_{GLS}]$  dan

$$\text{var}(\hat{q}) = \text{var}(\hat{\beta}_{OLS}) - \text{var}(\hat{\beta}_{GLS})$$

Berikut perhitungan nilai statistik Hausman berdasar kriteria Wald:

$$W = X^2[K] = [\hat{\beta}, \hat{\beta}_{GLS}]' \Sigma^{-1} [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$$

Uji hausman menggunakan hipotesis yang dibandingkan:

$H_0$  : Memilih model *random effect*

$H_a$  : Memilih model *fixed effect*

Gagal menolak hipotesis nol jika nilai statistik Hausman (nilai  $W$ -hitung) lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-square*, atau dengan kata lain *p-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang digunakan. Hal ini berarti bahwa regresi data panel dengan model

*Random Effects* lebih baik untuk dilakukan daripada model *Fixed Effects* (Sriyana, 2014).

### 3.3.4 Uji Hipotesis

#### 3.3.4.1 Uji t

Uji t atau yang juga disebut koefisien regresi secara parsial merupakan pengujian terhadap setiap variabel bebas atau independen yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen, di mana variabel independen lainnya dianggap tetap. Berikut hipotesis dalam uji t:

- Uji Hipotesis Positif

$H_0$  :  $\beta_i \leq 0$ , variabel independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen secara parsial

$H_1$  :  $\beta_i > 0$ , variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen secara parsial

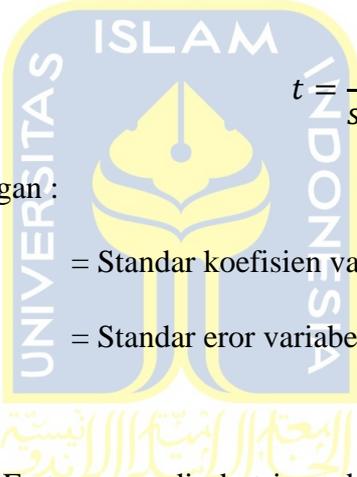
- Uji Hipotesis Negatif

$H_0$  :  $\beta_i \leq 0$ , variabel independen tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen secara parsial

$H_1 : \beta_i > 0$ , variabel independen berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen secara parsial

Dalam pengujiannya, ketika *p-value* dari *t* hitung lebih kecil dari  $\alpha$  (5%) maka menolak  $H_0$ . Namun apabila *p-value* lebih besar dari  $\alpha$  maka akan gagal menolak  $H_0$ .

Berikut perhitungan untuk menemukan *t* hitung  $\beta_i$  dengan rumus:



$$t = \frac{\hat{\beta}_i}{se(\hat{\beta}_i)}$$

Keterangan :

$\beta_i$  = Standar koefisien variabel

*se* = Standar error variabel independen

#### 3.3.4.2 Uji F

Uji F atau yang disebut juga dengan koefisien regresi secara menyeluruh merupakan pengujian yang dilakukan terhadap semua variabel bebas atau independen untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berikut hipotesis dalam uji F:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_i : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Dalam pengujiannya, ketika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel maka gagal menolak  $H_0$  sehingga variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Namun, ketika F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka menolak  $H_0$  sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Berikut perhitungan untuk menemukan F hitung dengan rumus:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

$R$  = Koefisien determinasi

$n$  = Banyaknya observasi

$k$  = Jumlah variabel independen

#### 3.3.4.3 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Sriyana (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar garis regresi dalam menjelaskan perilaku datanya. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Hubungan antara variabel bebas yang semakin erat dengan variabel terikat ditunjukkan dengan semakin

tinggi nilai koefisien determinasinya. Berikut rumus koefisien determinasi:

$$R^2 = ESS/TSS$$

$$= \frac{TSS - RSS}{TSS} = 1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Keterangan :

ESS = Garis regresi

TSS = Total variasi Y

RSS = Residual atau variabel pengganggu

Dari rumus di atas terlihat bahwa koefisien determinasi akan meningkat sesuai dengan jumlah variabel bebasnya, hal ini berarti ketika di dalam model variabel independen terus bertambah maka koefisien determinasi akan semakin besar.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada analisis dan pembahasan ini memaparkan data penelitian dan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh dari upah minimum kabupaten/kota, PDRB dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2018.

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan jenis data *cross section* dan *time series* dengan data sekunder yang diperoleh dari 14 kabupaten dan kota di provinsi Lampung pada kurun waktu tahun 2011-2018. Data tersebut adalah upah minimum kabupaten/kota, PDRB per kabupaten/kota dan belanja daerah per kabupaten/kota dengan jumlah observasi sebanyak 112.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Variabel Dependen

###### a. Bekerja (Y)

Data penyerapan tenaga kerja yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah data jumlah angkatan kerja yang

bekerja di Provinsi Lampung tahun 2011-2018 dengan satuan jiwa. Data ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

## 2. Variabel Independen (X)

### a. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Data upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Lampung mulai dari tahun 2011 hingga 2018 dengan satuan rupiah. Data ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

### b. PDRB

Data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 mulai dari tahun 2011 sampai 2018 dengan satuan juta rupiah. Data ini diperoleh dari Publikasi Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

### c. Belanja Daerah

Data belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data belanja daerah Provinsi Lampung dari tahun 2011 hingga 2018 dengan satuan rupiah. Data ini diperoleh dari *website* Visualisasi Data DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## 4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Sebelum melakukan regresi data panel, diperlukan melakukan pengujian dengan menggunakan uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD), pengujian ini dilakukan untuk menentukan model mana yang tepat untuk digunakan, linier atau log-linier. Berikut persamaan regresi antara model linier dan log-linier:

$$\text{Linier} : Bekerja_i = \beta_0 + \beta_1 UMK + \beta_2 PDRB + \beta_3 BD + \beta_4 Z_1 + e_i$$

$$\text{Log-Linier} : \log(Bekerja)_i = \beta_0 + \beta_1 \log(UMK) + \beta_2 \log(PDRB) + \beta_3 \log(BD) + \beta_4 Z_2 + e_i$$

Hasil uji MWD dengan menggunakan aplikasi olah data *Eviews9* sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### Hasil Uji MWD Model Linier

Dependent Variable: BEKERJA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156212.1	17912.39	8.720898	0.0000
UMK	-0.090345	0.016726	-5.401377	0.0000
PDRB	0.009715	0.001055	9.212664	0.0000
BD	9.54E-08	2.65E-08	3.602299	0.0005
Z1	-152334.7	44926.23	-3.390774	0.0010
R-squared	0.915188	Mean dependent var	261681.3	

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji MWD Log-Linier**

Dependent Variable: LOG(BEKERJA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.82796	2.005515	-5.897717	0.0000
LOG(UMK)	-0.940771	0.117431	-8.011296	0.0000
LOG(PDRB)	0.244113	0.065963	3.700780	0.0003
LOG(BD)	1.210136	0.147030	8.230514	0.0000
Z2	-2.29E-06	9.64E-07	-2.371400	0.0195
R-squared	0.883400	Mean dependent var	12.29739	

Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji MWD model linier menunjukkan nilai probabilitas Z1 sebesar 0,0010 maka menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat adalah model log-linier. Namun, berdasarkan hasil uji MWD model log-linier pada tabel 4.2 menunjukkan nilai Z2 sebesar 0,0195 maka menolak  $H_a$  sehingga model yang tepat adalah model linier.

Kedua model tersebut menunjukkan bahwa keduanya signifikan sehingga diperlukan pengambilan keputusan dengan melihat *R-squared* yang lebih besar diantara kedua model, karena nilai *R-squared* sebesar 0,915188 > *R-squared* model log-linier sebesar 0,883400 maka model linier merupakan model yang tepat untuk dipilih.

## 4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Setelah melakukan uji MWD dan dipilihnya model linier sebagai model yang tepat untuk digunakan, selanjutnya dilakukan estimasi regresi model pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan hasil regresi yang terbaik dalam penelitian, yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*.

### 4.2.2.1 Common Effect Model (CEM)

**Tabel 4.3**  
**Hasil Regresi Model *Common Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	130669.3	17022.86	7.676108	0.0000
UMK	-0.093190	0.017498	-5.325715	0.0000
PDRB	0.009024	0.001084	8.326478	0.0000
BD	1.25E-07	2.62E-08	4.757981	0.0000
R-squared	0.906075	Mean dependent var		261681.3
Adjusted R-squared	0.903466	S.D. dependent var		154976.1
S.E. of regression	48150.92	Akaike info criterion		24.43713
Sum squared resid	2.50E+11	Schwarz criterion		24.53422
Log likelihood	-1364.479	Hannan-Quinn criter.		24.47652
F-statistic	347.2853	Durbin-Watson stat		0.340370
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukkan hasil regresi model *common effect* diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,906075; ini artinya sebanyak 90,61% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan sisanya sebanyak 9,39% dijelaskan variabel di luar model. Didapatkan nilai

koefisien masing-masing variabel independen dari hasil regresi diatas yaitu koefisien variabel UMK sebesar -0,093190; koefisien variabel PDRB sebesar 0,009024; dan koefisien variabel belanja daerah (BD) sebesar 0,000000125.

#### 4.2.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

**Tabel 4.4**

**Hasil Regresi Model *Fixed Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148012.2	11077.68	13.36129	0.0000
UMK	-0.000633	0.007672	-0.082536	0.9344
PDRB	0.009089	0.001422	6.393392	0.0000
BD	-9.11E-09	1.36E-08	-0.667717	0.5059
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.991297	Mean dependent var	261681.3	
Adjusted R-squared	0.989831	S.D. dependent var	154976.1	
S.E. of regression	15628.14	Akaike info criterion	22.29048	
Sum squared resid	2.32E+10	Schwarz criterion	22.70311	
Log likelihood	-1231.267	Hannan-Quinn criter.	22.45790	
F-statistic	676.2719	Durbin-Watson stat	1.918840	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan hasil regresi model *fixed effect* diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,991297; ini artinya sebanyak 99,13% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan sisanya hanya sebanyak 0,87% dijelaskan variabel di luar model.

### 4.2.2.3 Random Effect Model (REM)

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Model *Random Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	124011.9	12433.46	9.974049	0.0000
UMK	-0.009463	0.007470	-1.266805	0.2080
PDRB	0.012318	0.000953	12.92071	0.0000
BD	-1.55E-08	1.28E-08	-1.215150	0.2270

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		35139.14	0.8349
Idiosyncratic random		15628.14	0.1651

Weighted Statistics			
R-squared	0.724967	Mean dependent var	40648.11
Adjusted R-squared	0.717327	S.D. dependent var	32994.69
S.E. of regression	17542.28	Sum squared resid	3.32E+10
F-statistic	94.89334	Durbin-Watson stat	1.407456
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.862195	Mean dependent var	261681.3
Sum squared resid	3.67E+11	Durbin-Watson stat	0.127325

Dari hasil regresi model *random effect* pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas variabel UMK dan belanja daerah tidak signifikan pada  $\alpha$  (5%) sedangkan variabel PDRB signifikan dan diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,724967.

### 4.2.3 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pemilihan model terbaik dengan beberapa uji sebagai berikut:

#### 4.2.3.1 Uji Chow

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik digunakan, model *common effect* atau model *fixed effect*, maka dilakukan uji *Chow* dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Memilih model *common effect*

$H_a$  : Memilih model *fixed effect*

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.555566	(13,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	266.424246	13	0.0000

Dari hasil uji *chow* pada tabel 4.6 diperoleh nilai probabilitas *cross section chi square* sebesar  $0,0000 < \alpha$  (5%) sehingga menolak  $H_0$  maka model yang dipilih adalah model *fixed effect*.

Terpilihnya *fixed effect* pada uji *chow* menunjukkan tidak perlunya melakukan uji *lagrange Multiplier* (LM), yang mana

uji LM dilakukan untuk mengetahui model manakah yang lebih baik digunakan antara model *common effect* atau model *random effects*. Melihat model *common effects* tidak terpilih pada uji *chow* sehingga dilakukan pemilihan antara model *fixed effect* dan model *random effect* maka dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman.

#### 4.2.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model yang lebih baik digunakan, antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Memilih model *random effect*

$H_a$  : Memilih model *fixed effect*

**Tabel 4.7**

#### Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.075865	3	0.0000

Melihat dari hasil uji Hausman pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa diperoleh nilai *cross section random*

sebesar 31,075865 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < \alpha$  (5%), sehingga menolak  $H_0$  artinya model yang dipilih adalah model *fixed effect*.

Dapat ditarik kesimpulan dari uji *chow* dan uji Hausman, model terbaik yang terpilih adalah model *fixed effect*.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

##### 4.2.4.1 Uji t (uji secara individu)

Uji t dilakukan berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang terpilih untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_i \leq 0$ , variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial

$H_1: \beta_i > 0$ , variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial

Berdasarkan model *fixed effect* yang dipilih sebagai model terbaik, berikut pengujiannya:

**Tabel 4.8****Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148012.2	11077.68	13.36129	0.0000
UMK	-0.000633	0.007672	-0.082536	0.9344
PDRB	0.009089	0.001422	6.393392	0.0000
BD	-9.11E-09	1.36E-08	-0.667717	0.5059

## 1. Variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK)

Berdasarkan hasil estimasi pada regresi model *fixed effect* diperoleh nilai probabilitas variabel UMK sebesar  $0,9344 > \alpha$  (5%) maka gagal menolak  $H_0$ , ini artinya variabel UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel bekerja.

## 2. Variabel produk domestik regional bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil estimasi pada regresi model *fixed effect* diperoleh nilai probabilitas variabel PDRB sebesar  $0,0000 < \alpha$  (5%) maka menolak  $H_0$ , ini artinya variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap variabel bekerja.

## 3. Variabel belanja daerah (BD)

Berdasarkan hasil estimasi pada regresi model *fixed effect* diperoleh nilai probabilitas variabel BD sebesar  $0,0,5059 > \alpha$  (5%) maka gagal menolak  $H_0$ , ini artinya variabel BD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel bekerja.

#### 4.2.4.2 Uji F (uji secara menyeluruh)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara menyeluruh terhadap variabel dependen. Berikut hipotesis dalam uji F:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_i : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Berdasarkan model *fixed effect* yang dipilih sebagai model terbaik, berikut pengujiannya:

**Tabel 4.9**  
**Uji F**

R-squared	0.991297	Mean dependent var	261681.3
Adjusted R-squared	0.989831	S.D. dependent var	154976.1
S.E. of regression	15628.14	Akaike info criterion	22.29048
Sum squared resid	2.32E+10	Schwarz criterion	22.70311
Log likelihood	-1231.267	Hannan-Quinn criter.	22.45790
F-statistic	676.2719	Durbin-Watson stat	1.918840
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil estimasi pada regresi model *fixed effect* diperoleh nilai probabilitas (F-statistik) sebesar  $0,000000 < \alpha$  (5%) maka menolak  $H_0$ , ini artinya seluruh variabel independen (upah minimum, pdrb dan belanja daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (bekerja) secara bersama-sama.

#### 4.2.4.3 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Pengujian dengan koefisien determinasi (R-Squared) dilakukan untuk mengetahui persentase variasi total dari variabel dependen yang dijelaskan pada model regresi. Berdasarkan hasil estimasi pada regresi model *fixed effect* diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,991297 artinya sebesar 99,13% variabel independen (upah minimum, pdrb dan belanja daerah) mampu menjelaskan variasi variabel dalam model, sementara 0,87% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.



#### 4.2.5 Interpretasi Hasil

Menjelaskan hasil interpretasi antar variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen, yang didasarkan pada koefisien variabel.

1. Upah minimum kabupaten/kota memiliki nilai koefisien sebesar  $-0,000633$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,9344 > \alpha$  (5%), ini artinya upah minimum kabupaten/kota tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.
2. PDRB memiliki nilai koefisien positif sebesar  $0,009089$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < \alpha$  (5%), ini artinya PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung sehingga setiap PDRB naik 1 (satu) juta rupiah maka tenaga kerja akan mengalami kenaikan sebanyak  $0,009089$  jiwa atau setiap PDRB naik 1 (satu) miliar rupiah maka tenaga kerja akan mengalami kenaikan sebanyak 9,089 jiwa.
3. Belanja daerah memiliki nilai koefisien sebesar  $-0,00000000911$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,5059 > \alpha$  (5%), ini artinya belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

## **4.2.6 Analisis Ekonomi**

### **4.2.6.1 Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung**

Upah minimum kabupaten/kota selalu meningkat tiap tahunnya mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam perhitungan formulasi penetapan UMK. Peningkatan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja yang terserap berdasarkan kebutuhan produksi dimana unit usaha di Provinsi Lampung didominasi oleh sektor UMKM atau unit usaha lain yang tidak menerapkan UMK dalam membayarkan upah kepada pekerjanya sehingga perubahan upah tidak mempengaruhi suatu usaha atau perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusniati, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang” dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menemukan

bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena di Kabupaten Malang mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor informal dimana tidak ditetapkan upah minimum pada sektor tersebut namun pemberian upah tergantung dari kontribusi dan perolehan hasil di setiap hari maupun setiap bulannya.

Buchari (2016) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015” dengan menggunakan model regresi data panel efek tetap menemukan bahwa upah minimum tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena peningkatan upah akan menyebabkan pekerja mampu lebih memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akan memiliki produktifitas yang lebih tinggi, hal ini akan menekan biaya produksi perusahaan dan tidak terjadi pengurangan tenaga kerja.

#### **4.2.6.2 Analisis Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung**

Berdasarkan hasil regresi, PDRB berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap

penyerapan tenaga kerja. PDRB yang meningkat akan menaikkan jumlah tenaga kerja yang terserap, hal ini diasumsikan dengan peningkatan jumlah nilai output pada sektor ekonomi di mana peningkatan tersebut akan mendorong perusahaan dalam menyerap tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengoptimalkan peningkatan produksinya sehingga mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan.

Ziyadaturrofiqoh, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi” menemukan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, output atau penjualan yang dilakukan perusahaan semakin besar akan terjadi penambahan tenaga kerja karena perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan produksinya dalam mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Utami (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja, dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember” dengan menggunakan metode OLS

menunjukkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja karena PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar.

#### **4.2.6.3 Analisis Pengaruh Variabel Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi diakibatkan penggunaan dana APBD yang dialokasikan pada belanja daerah kurang merata dimana sebagian besar dana dialokasikan dalam pembiayaan belanja pegawai dan untuk biaya pembangunan daerah lebih sedikit, ini dapat dilihat dari pembagian anggaran dana antara belanja pegawai dan belanja modal di Provinsi Lampung dalam dua tahun terakhir. Belanja pegawai di tahun 2017 sebesar 19,90 persen dan 20,57 persen di tahun 2018 dari dana yang dianggarkan sedangkan belanja modal di tahun 2017 sebesar 4,23 persen dan di tahun 2018 hanya sebesar 0,57 persen dari dana yang dianggarkan. Kurangnya pengalokasian dana yang merata ini menyebabkan kurang terbukanya kesempatan

kerja pada pembangunan pengadaan pelayanan publik atas sosial ekonomi.

Ariyanto (2010) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007” dengan analisis kuantitatif menggunakan ECM disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Pengeluaran pembangunan sangat penting bagi perbaikan infrastruktur suatu daerah/negara termasuk penciptaan kesempatan kerja. Akan tetapi jika hal itu tidak bisa dirasakan masyarakat secara merata maka akan terjadi ketimpangan. Kurangnya penyebaran informasi pasar kerja juga menjadi kendala tersendiri.

Hellen, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja” menemukan bahwa belanja pemerintah sementara tidak berpengaruh signifikan terhadap lapangan kerja. Hal ini dikarenakan apabila pengeluaran pemerintah tersebut yang

digunakan untuk pembangunan, pembangunan tersebut tidak lagi berjalan atau stagnant, dikarenakan tidak adanya investor. Implikasinya tidak adanya penyerapan tenaga kerja di sektor pembangunan tersebut.



#### 4.2.7 Analisis Intercept Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

**Tabel 4.10**  
**Perbedaan Intercept Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Koefisien per Kabupaten</b>	<b>Koefisien C</b>	<b>Intercept</b>
Kab. Lampung Tengah	143427.8	148012.2	291440.000
Kab. Lampung Timur	114414.4	148012.2	262426.600
Kab. Lampung Selatan	68869.49	148012.2	216881.690
Kab. Tanggamus	56211.93	148012.2	204224.130
Kab. Lampung Barat	17618.53	148012.2	165630.730
Kab. Lampung Utara	10719.46	148012.2	158731.660
Kab. Way Kanan	-2429.204	148012.2	145582.996
Kota Bandar Lampung	-4193.743	148012.2	143818.457
Kab. Pringsewu	-23886.07	148012.2	124126.130
Kab. Pesawaran	-38806.17	148012.2	109206.030
Kab. Tulang Bawang	-63708.57	148012.2	84303.630
Kab. Tulang Bawang Barat	-70187.53	148012.2	77824.670
Kota Metro	-102715.3	148012.2	45296.900
Kab. Mesuji	-105335.0	148012.2	42677.200

Dari tabel di atas terlihat nilai *intercept* dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada tabel dijelaskan terdapat empat Kabupaten dengan nilai *intercept* tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Tanggamus dengan nilai *intercept* masing-masing sebesar 291440,0; 262426,6; 216881,69; dan 204224,130; ini

artinya Kabupaten Lampung Tengah memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 291440 jiwa, Kabupaten Lampung Timur memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 262426,6 jiwa, Kabupaten Lampung Selatan memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 216887,69 jiwa, dan Kabupaten Tanggamus memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 204224,130 jiwa.

Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, banyaknya pabrik-pabrik perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah mampu menyerap banyak tenaga kerja, perusahaan-perusahaan tersebut memilih Kabupaten Lampung Tengah memanfaatkan sumber daya alam di daerah tersebut dengan memiliki kebun sendiri sebagai bahan produksinya. Begitupun pada Kabupaten Lampung Timur yang memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi kedua juga terdapat banyak pabrik perusahaan yang dibuka di daerah Lampung Timur. Sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan yang wilayah geografisnya terletak di pesisir pantai selatan Provinsi Lampung, juga menyerap tenaga kerja yang tinggi diakibatkan banyaknya wisata pantai ataupun disekitar pantai yang dibuka serta adanya investasi dalam bentuk pariwisata. Selain tiga Kabupaten tersebut, Kabupaten lainnya yang memiliki penyerapan tinggi berada di

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tanggamus memiliki potensi wisata bahari yang salah satunya menjadi unggulan yaitu jalur migrasi lumba-lumba di laut lepas dan adanya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta banyaknya industri di daerah Tanggamus hingga terdapat perencanaan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) sejak 2011.

Adapun empat Kota/Kabupaten dengan nilai *intercept* terendah yaitu Kabupaten Mesuji, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai *intercept* masing-masing sebesar 42677,200; 45296,900; 77824,670; dan 84303,630 ini artinya Kabupaten Mesuji memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 42677,2 jiwa, Kota Metro memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 45296,9 jiwa, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 77824,67 jiwa, dan Kabupaten Tulang Bawang memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 84303,63 jiwa.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mesuji diakibatkan wilayah geografisnya yang merupakan daerah agraris dimana mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Wilayah geografis yang hampir 50 persen didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi juga terdapat pada Kota Metro sehingga pekerjaan penduduknya sebagian besar adalah petani, di Kota Metro juga

perbandingan pekerjaan penduduknya sebagian besar pada sektor pemerintahan, perdagangan, dan sebagian kecil pada sektor transportasi dan komunikasi serta konstruksi. Selain dua Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memiliki penyerapan tenaga kerja yang rendah, Kabupaten yang baru diresmikan pada 2008 ini masih terdapat keterbatasan dalam pembangunan serta mayoritas penduduknya merupakan transmigran dari beberapa daerah di Indonesia seperti dari daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta mata pencaharian mayoritas penduduknya yaitu berkebun dengan mengandalkan kebun sawit, kebun karet dan lainnya. Adapun Kabupaten lainnya yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang rendah yaitu Kabupaten Tulang Bawang, hal ini disebabkan masih sedikitnya industri yang ada di daerah tersebut dan kurangnya potensi wisata alamnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data sekunder mengenai pengaruh dari variabel-variabel yang meliputi upah minimum kabupaten/kota, PDRB dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2011-2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan kebutuhan produksi unit usaha di Provinsi Lampung didominasi oleh sektor UMKM yang tidak menerapkan UMK dalam membayarkan upah kepada pekerja sehingga perubahan UMK tidak mempengaruhi unit usaha atau perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
2. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, ini artinya peningkatan PDRB akan menaikkan jumlah tenaga kerja yang terserap karena peningkatan jumlah nilai output akan mendorong

perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk mengoptimalkan tingkat penjualan produksi perusahaan.

3. Variabel belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Hal ini terjadi akibat pengalokasian dana APBD kurang merata, yang mana sebagian besar dana dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai dan lebih sedikit untuk biaya pembangunan. Pengalokasian yang kurang merata menyebabkan kurang terbukanya kesempatan kerja pada pembangunan pengadaan pelayanan publik atas sosial ekonomi.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis determinan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2011-2018, terdapat beberapa implikasi yaitu :

1. Penyesuaian penetapan upah minimum kabupaten/kota harus disesuaikan dengan kondisi wilayah daerahnya agar kebijakan upah minimum dapat berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan upah minimum kabupaten/kota sebagai faktor yang paling dominan dalam pasar tenaga kerja juga perlu memerhatikan kegiatan UMKM di setiap daerah, karena kebijakan upah minimum yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dalam penerimaan upah yang terlalu rendah tidak selalu diterapkan oleh UMKM yang ada di Provinsi Lampung.

2. PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh pada tenaga kerja yang terserap. PDRB diharapkan selalu meningkat karena peningkatan ini mampu mempengaruhi perusahaan dalam memutuskan jumlah tenaga kerja yang akan diserap. Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan bantuan modal untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri supaya dapat mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan produktivitas perusahaan.
3. Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mampu melakukan campur tangan dengan mengoptimalkan alokasi APBD secara merata, terutama memfokuskan dalam kegiatan pembangunan pada sektor ekonomi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan terserapnya tenaga kerja karena kegiatan pembangunan tersebut tidak terlepas dari penggunaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Ariyanto. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Provinsi Lampung 2013*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2014*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2015*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2015*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2016*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2016*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2016*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2017*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2017*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

- \_\_\_\_\_. 2018. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2018*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2018*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2019*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Bellante, Don dan Mark Jackson. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Borjas, George J. 2013. *Labor Economics: sixth edition*. New York: McGraw-Hill.
- Buchari, Imam. (2016). “Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015”. *EKSIS*, Volume XI No 1, April 2016
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_ and Jaka Sriyana. (2016). “Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia”. *Regional Science Inquiry*, Vol. VIII, (1), 2016, pp. 11-21
- Hartono, Rudi. (2018). “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”. *INOVASI*, 14 (1) 2018, 36-43

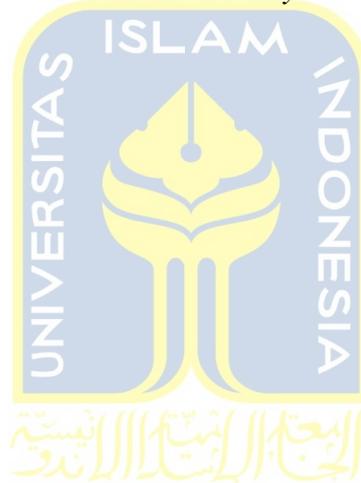
- Helen. (2017). “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja”. *INOVASI*, Vol. 13 (1), 2017, 28-38
- Kairupan, Siesti Pristina. “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012”. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No.4 Desember 2013, Hal. 2206-2216
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. 2018, Permenaker No 15/2018 tentang Upah Minimum.
- Peraturan Pemerintah RI. 2019, PP No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rusniati, Ririn. (2018). “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang”. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.2, Agustus 2018
- Santoso, Rokhedi Priyo. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Utami, Turminijati Budi. (2009). “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan*, Vol. 1 No.1, Nopember 2009
- Vitalia, Devi Rizky. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wasilaputri, Febryana Rizqi. (2016). *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wihastuti, Latri dan Henny Rahmatullah. (2018). “Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa”. *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No.1, Januari 2018, 96-102

Visualisasi Data APBD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Series Anggaran dan Realisasi, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/>

Ziyadaturrofiqoh. (2018). “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi”. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 7 No.1, Januari-April 2018



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### Data Penelitian

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Bekerja (jiwa)</b>	<b>UMK (rupiah)</b>	<b>PDRB (juta rupiah)</b>	<b>BD (rupiah)</b>
Kota Bandar Lampung	2011	370.995	865.000,00	23.818.685,00	1.154.628.593.735
	2012	330.999	981.000,00	25.403.655,00	1.464.988.926.884
	2013	361.957	1.165.000,00	27.123.918,00	1.779.859.865.268
	2014	385.417	1.422.500,00	29.011.529,00	1.799.475.905.415
	2015	407.190	1.649.500,00	30.873.559,78	1.757.419.863.235
	2016	440.865	1.870.000,00	32.859.032,47	1.755.858.575.286
	2017	437.884	2.054.365,00	34.921.075,57	2.207.777.630.380
	2018	468.121	2.263.390,87	37.089.488,75	2.431.870.567.150
Kab. Lampung Barat	2011	197.537	855.000,00	5.271.085,00	682.910.267.015
	2012	245.884	975.000,00	3.440.999,00	737.414.784.098
	2013	234.194	1.150.000,00	3.682.582,00	844.889.084.200
	2014	226.724	1.399.037,00	3.887.691,00	627.029.312.025
	2015	150.692	1.581.000,00	4.088.443,37	893.360.816.780
	2016	163.838	1.763.000,00	4.293.421,38	999.084.481.888
	2017	172.763	1.908.447,50	4.509.536,36	1.122.380.535.135
	2018	169.964	2.155.326,00	4.741.247,68	1.144.747.728.661
Kab. Lampung Selatan	2011	410.925	855.000,00	19.613.120,00	926.312.965.335
	2012	379.497	975.000,00	20.782.043,00	1.117.184.706.651
	2013	394.558	1.150.000,00	19.613.120,00	1.163.924.758.330
	2014	413.061	1.402.000,00	22.060.244,00	1.263.321.080.299

	2015	391.850	1.595.000,00	23.384.046,00	1.490.080.612.986
	2016	419.692	1.800.500,00	25.942.709,01	1.864.084.864.272
	2017	454.422	1.973.798,12	27.359.532,84	2.072.627.427.204
	2018	453.259	2.168.702,48	28.798.196,49	2.718.641.448.999
Kab. Lampung Tengah	2011	552.750	862.500,00	30.867.150,00	1.274.319.702.999
	2012	588.296	982.000,00	32.702.372,00	1.455.637.135.686
	2013	585.425	1.154.500,00	34.719.010,00	1.612.488.002.867
	2014	619.792	1.400.000,00	36.673.948,00	1.724.090.117.470
	2015	614.025	1.588.000,00	38.773.799,41	1.898.878.305.447
	2016	666.671	1.770.620,00	40.949.374,19	2.274.041.706.308
	2017	639.486	1.916.696,15	43.107.048,96	2.491.283.236.819
	2018	671.308	2.083.640,38	45.444.024,47	2.909.028.887.888
Kab. Lampung Timur	2011	451.664	855.000,00	20.582.085,00	1.049.653.562.233
	2012	453.264	975.000,00	21.445.319,00	1.248.733.644.646
	2013	435.008	1.150.000,00	23.182.063,00	1.410.275.163.144
	2014	452.139	1.399.037,00	23.817.440,00	1.512.492.030.233
	2015	472.970	1.581.000,00	25.151.473,40	1.733.408.499.652
	2016	512.593	1.763.100,00	26.292.188,26	1.922.657.369.456
	2017	484.169	1.908.555,75	27.510.388,94	1.947.368.023.838
	2018	498.466	2.074.800,00	28.550.596,07	2.131.099.762.848
Kab. Lampung Utara	2011	261.350	855.000,00	10.729.166,00	891.558.136.915
	2012	242.358	975.000,00	11.333.804,00	976.482.074.072
	2013	242.561	1.150.000,00	12.008.526,00	1.109.303.360.950
	2014	282.401	1.399.037,00	12.720.394,00	1.163.202.313.490
	2015	258.273	1.581.000,00	13.458.838,84	1.436.536.172.423
	2016	279.572	1.763.000,00	14.145.711,83	1.634.691.696.234
	2017	265.131	1.921.670,00	14.882.707,02	1.800.605.956.168

	2018	285.512	2.100.000,00	15.675.555,48	1.877.056.834.286
Kab. Mesuji	2011	87.895	855.000,00	4.585.332,00	477.269.041.268
	2012	82.033	975.000,00	4.840.754,00	437.648.077.892
	2013	73.724	1.150.000,00	5.107.764,00	478.116.057.686
	2014	90.078	1.399.037,00	5.382.670,00	578.550.526.430
	2015	83.504	1.581.000,00	5.716.225,59	636.024.180.646
	2016	89.789	1.763.000,00	6.008.001,74	735.747.182.487
	2017	98.391	1.908.447,50	6.320.642,98	688.848.346.903
	2018	89.316	2.074.673,27	6.656.010,51	886.227.267.227
Kota Metro	2011	61.844	855.000,00	2.695.657,00	514.796.885.444
	2012	61.583	975.000,00	2.876.025,00	518.616.362.047
	2013	67.077	1.150.000,00	3.070.593,00	609.265.220.467
	2014	66.914	1.420.000,00	3.268.982,00	694.000.976.646
	2015	67.590	1.582.000,00	3.453.953,23	757.884.870.365
	2016	73.702	1.764.000,00	3.657.866,68	875.876.415.196
	2017	72.541	1.909.530,00	3.865.010,33	839.011.920.310
	2018	76.884	2.075.850,06	4.084.824,76	895.290.359.398
Kab. Pesawaran	2011	185.113	855.000,00	7.513.109,00	570.373.424.954
	2012	163.393	975.000,00	7.954.316,00	672.390.705.437
	2013	168.065	1.150.000,00	8.407.664,00	822.431.621.675
	2014	179.458	1.399.037,00	8.845.907,00	930.780.038.473
	2015	172.673	1.581.000,00	9.368.564,36	948.851.310.024
	2016	185.506	1.763.000,00	9.843.453,33	1.212.984.685.375
	2017	199.288	1.908.447,50	10.337.029,23	1.280.926.476.209
	2018	206.326	2.074.673,27	10.863.631,90	1.369.538.605.021
	2011	165.624	855.000,00	5.042.603,00	577.092.262.898
	2012	152.606	975.000,00	5.367.487,00	726.890.537.098

Kab. Pringsewu	2013	163.778	1.150.000,00	5.697.373,00	772.327.157.948
	2014	164.027	1.399.037,00	6.029.850,00	840.212.481.493
	2015	172.710	1.581.000,00	6.356.989,91	1.002.293.229.834
	2016	186.201	1.763.000,00	6.677.348,62	1.188.366.264.867
	2017	173.612	1.908.447,50	7.018.698,27	1.183.049.316.577
	2018	189.081	2.074.673,27	7.371.613,80	1.221.359.456.500
Kab. Tanggamus	2011	248.649	855.000,00	6.841.758,00	702.667.603.114
	2012	264.478	975.000,00	7.470.391,00	829.067.494.987
	2013	250.725	1.150.000,00	7.905.596,00	899.020.850.756
	2014	275.018	1.399.037,00	8.362.244,00	993.881.456.252
	2015	264.712	1.581.000,00	8.910.244,74	1.151.812.890.322
	2016	287.235	1.763.000,00	9.371.994,22	1.358.575.195.294
	2017	264.049	1.908.447,50	9.858.643,75	1.547.099.699.352
	2018	316.097	2.074.673,27	10.353.181,08	1.654.885.309.464
Kab. Tulang Bawang	2011	181.514	863.500,00	10.284.191,00	622.262.830.796
	2012	175.076	982.500,00	10.827.945,00	825.925.193.844
	2013	174.425	1.155.000,00	11.430.142,00	696.002.596.623
	2014	191.149	1.401.000,00	12.188.294,00	776.125.961.712
	2015	179.649	1.585.500,00	12.811.520,10	978.687.514.969
	2016	192.739	1.771.200,00	13.505.401,04	1.132.055.773.835
	2017	205.855	1.917.324,00	14.242.028,88	1.148.944.548.987
	2018	210.037	2.084.322,98	15.023.467,25	1.316.671.826.046
Kab. Tulang Bawang Barat	2011	117.459	855.000,00	5.095.213,00	448.420.180.170
	2012	120.739	975.000,00	5.388.189,00	507.524.838.909
	2013	120.544	1.150.000,00	5.696.244,00	565.054.667.233
	2014	117.621	1.408.000,00	6.002.466,00	576.692.368.014
	2015	126.712	1.590.000,00	6.370.000,89	805.184.948.185

	2016	137.656	1.792.100,00	6.705.639,20	867.115.790.170
	2017	139.818	1.939.948,25	7.078.062,44	845.176.384.817
	2018	135.084	2.108.917,74	7.467.807,15	1.109.381.704.871
Kab. Way Kanan	2011	188.982	866.000,00	6.336.558,00	595.130.620.490
	2012	189.101	983.000,00	6.687.926,00	631.173.628.245
	2013	199.561	1.160.000,00	7.025.799,00	757.542.651.305
	2014	209.359	1.408.000,00	7.377.069,00	845.628.401.730
	2015	203.575	1.581.000,00	7.832.393,20	862.495.025.981
	2016	220.459	1.790.000,00	8.233.786,34	1.180.257.690.465
	2017	211.912	1.950.000,00	8.654.296,19	1.350.721.647.447
	2018	220.524	2.160.000,00	9.105.176,39	1.503.894.221.594

**Keterangan :**

Bekerja : Tenaga Kerja Yang Terserap (Jiwa)

UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2010 (Juta Rupiah)

BD : Belanja Daerah (Rupiah)

## LAMPIRAN II

### Hasil Uji MWD Model Linier

Dependent Variable: BEKERJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 06:21

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156212.1	17912.39	8.720898	0.0000
UMK	-0.090345	0.016726	-5.401377	0.0000
PDRB	0.009715	0.001055	9.212664	0.0000
BD	9.54E-08	2.65E-08	3.602299	0.0005
Z1	-152334.7	44926.23	-3.390774	0.0010
R-squared	0.915188	Mean dependent var		261681.3
Adjusted R-squared	0.912018	S.D. dependent var		154976.1
S.E. of regression	45968.69	Akaike info criterion		24.35292
Sum squared resid	2.26E+11	Schwarz criterion		24.47429
Log likelihood	-1358.764	Hannan-Quinn criter.		24.40216
F-statistic	288.6548	Durbin-Watson stat		0.432593
Prob(F-statistic)	0.000000			

### LAMPIRAN III

#### Hasil Uji MWD Log-Linier

Dependent Variable: LOG(BEKERJA)

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 06:29

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.82796	2.005515	-5.897717	0.0000
LOG(UMK)	-0.940771	0.117431	-8.011296	0.0000
LOG(PDRB)	0.244113	0.065963	3.700780	0.0003
LOG(BD)	1.210136	0.147030	8.230514	0.0000
Z2	-2.29E-06	9.64E-07	-2.371400	0.0195
R-squared	0.883400	Mean dependent var		12.29739
Adjusted R-squared	0.879041	S.D. dependent var		0.614947
S.E. of regression	0.213873	Akaike info criterion		-0.203248
Sum squared resid	4.894380	Schwarz criterion		-0.081887
Log likelihood	16.38192	Hannan-Quinn criter.		-0.154008
F-statistic	202.6662	Durbin-Watson stat		0.488064
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN IV

### Hasil Regresi Model *Common Effect*

Dependent Variable: BEKERJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 06:52

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	130669.3	17022.86	7.676108	0.0000
UMK	-0.093190	0.017498	-5.325715	0.0000
PDRB	0.009024	0.001084	8.326478	0.0000
BD	1.25E-07	2.62E-08	4.757981	0.0000
R-squared	0.906075	Mean dependent var		261681.3
Adjusted R-squared	0.903466	S.D. dependent var		154976.1
S.E. of regression	48150.92	Akaike info criterion		24.43713
Sum squared resid	2.50E+11	Schwarz criterion		24.53422
Log likelihood	-1364.479	Hannan-Quinn criter.		24.47652
F-statistic	347.2853	Durbin-Watson stat		0.340370
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN V

### Hasil Regresi Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: BEKERJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 06:53

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148012.2	11077.68	13.36129	0.0000
UMK	-0.000633	0.007672	-0.082536	0.9344
PDRB	0.009089	0.001422	6.393392	0.0000
BD	-9.11E-09	1.36E-08	-0.667717	0.5059

#### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991297	Mean dependent var	261681.3
Adjusted R-squared	0.989831	S.D. dependent var	154976.1
S.E. of regression	15628.14	Akaike info criterion	22.29048
Sum squared resid	2.32E+10	Schwarz criterion	22.70311
Log likelihood	-1231.267	Hannan-Quinn criter.	22.45790
F-statistic	676.2719	Durbin-Watson stat	1.918840
Prob(F-statistic)	0.000000		

## LAMPIRAN VI

### Hasil Regresi Model *Random Effect*

Dependent Variable: BEKERJA  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 12/02/19 Time: 06:54  
 Sample: 2011 2018  
 Periods included: 8  
 Cross-sections included: 14  
 Total panel (balanced) observations: 112  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	124011.9	12433.46	9.974049	0.0000
UMK	-0.009463	0.007470	-1.266805	0.2080
PDRB	0.012318	0.000953	12.92071	0.0000
BD	-1.55E-08	1.28E-08	-1.215150	0.2270
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			35139.14	0.8349
Idiosyncratic random			15628.14	0.1651
Weighted Statistics				
R-squared	0.724967	Mean dependent var		40648.11
Adjusted R-squared	0.717327	S.D. dependent var		32994.69
S.E. of regression	17542.28	Sum squared resid		3.32E+10
F-statistic	94.89334	Durbin-Watson stat		1.407456
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.862195	Mean dependent var		261681.3
Sum squared resid	3.67E+11	Durbin-Watson stat		0.127325

## LAMPIRAN VII

### Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.555566	(13,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	266.424246	13	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BEKERJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 07:02

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	130669.3	17022.86	7.676108	0.0000
UMK	-0.093190	0.017498	-5.325715	0.0000
PDRB	0.009024	0.001084	8.326478	0.0000
BD	1.25E-07	2.62E-08	4.757981	0.0000
R-squared	0.906075	Mean dependent var		261681.3
Adjusted R-squared	0.903466	S.D. dependent var		154976.1
S.E. of regression	48150.92	Akaike info criterion		24.43713
Sum squared resid	2.50E+11	Schwarz criterion		24.53422
Log likelihood	-1364.479	Hannan-Quinn criter.		24.47652
F-statistic	347.2853	Durbin-Watson stat		0.340370
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN VIII

### Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.075865	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
UMK	-0.000633	-0.009463	0.000003	0.0000
PDRB	0.009089	0.012318	0.000001	0.0022
BD	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.1787

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BEKERJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 07:14

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148012.2	11077.68	13.36129	0.0000
UMK	-0.000633	0.007672	-0.082536	0.9344
PDRB	0.009089	0.001422	6.393392	0.0000
BD	-9.11E-09	1.36E-08	-0.667717	0.5059

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991297	Mean dependent var	261681.3
Adjusted R-squared	0.989831	S.D. dependent var	154976.1
S.E. of regression	15628.14	Akaike info criterion	22.29048
Sum squared resid	2.32E+10	Schwarz criterion	22.70311
Log likelihood	-1231.267	Hannan-Quinn criter.	22.45790
F-statistic	676.2719	Durbin-Watson stat	1.918840
Prob(F-statistic)	0.000000		